

Dinamika Sosial-Politik sebagai Penyebab Eskalasi Konflik di Timor Timur (1974-1999)

Fernanda Kurniawan
Universitas Pertahanan RI
(fernandakurniawan10@gmail.com)

Abstract

This study aims to analyze the socio-political dynamics that contributed to the escalation of conflict in East Timor during the period of 1974–1999. The research focuses on key factors such as the political restructuring following the collapse of Portugal’s Estado Novo regime, ideological competition among emerging local parties, and the military and political intervention carried out by Indonesia. Using a qualitative approach grounded in historical and political analysis, the study identifies that social instability, elite rivalry, and weak mechanisms for political transition played significant roles in perpetuating long-term conflict. Furthermore, external influences including Cold War dynamics, regional geopolitical interests, and international involvement intensified the complexity of the situation. The findings suggest that the escalation of conflict in East Timor cannot be understood solely as a local phenomenon but rather as the result of interactions between structural factors, domestic actors, and international interventions. This research contributes to a more comprehensive understanding of the roots of the conflict and its relevance for studies on conflict resolution and international relations.

Keywords: *East Timor, socio-political dynamics, conflict escalation, international intervention, 1974–1999.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sosial-politik yang berkontribusi terhadap eskalasi konflik di Timor Timur pada periode 1974–1999. Fokus utama kajian ini mencakup perubahan struktur politik menjelang runtuhnya rezim Estado Novo di Portugal, pertarungan ideologis antar partai lokal, serta intervensi militer dan politik yang dilakukan oleh Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif berbasis analisis historis dan politik, penelitian ini mengidentifikasi bahwa ketidakstabilan sosial, rivalitas elit politik lokal, serta lemahnya mekanisme transisi kekuasaan berperan signifikan dalam menciptakan kondisi konflik berkepanjangan. Selain itu, faktor eksternal seperti dinamika Perang Dingin, kepentingan geopolitik kawasan, dan campur tangan internasional turut memperkuat kompleksitas konflik tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa eskalasi konflik di Timor Timur tidak

dapat dipahami hanya sebagai fenomena lokal, melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor struktural, aktor domestik, dan intervensi internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akar konflik serta relevansinya bagi studi resolusi konflik dan hubungan internasional.

Kata Kunci: Timor Timur, dinamika sosial-politik, konflik, eskalasi, intervensi internasional, 1974–1999

1. Pendahuluan

Konflik yang terjadi di Timor Timur pada periode 1974-1999 merupakan salah satu episode paling kompleks dalam sejarah kontemporer Asia Tenggara. Eskalasi konflik yang berlangsung selama hampir seperempat abad tersebut tidak hanya menimbulkan ketegangan politik, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial yang berubah secara cepat di tengah runtuhnya kekuasaan kolonial Portugal dan masuknya pengaruh politik Indonesia. Meskipun sejumlah penelitian telah membahas proses integrasi Timor Timur, peran militer Indonesia, maupun dinamika geopolitik internasional yang melatarbelakangi konflik, kajian mengenai hubungan antara perubahan sosial-politik internal masyarakat Timor Timur dan meningkatnya intensitas konflik masih belum dikaji secara komprehensif. Kebanyakan penelitian cenderung menempatkan konflik Timor Timur sebagai persoalan politik-militer semata, sehingga aspek sosial, rivalitas elit lokal, serta perubahan identitas yang terjadi sejak 1974 kurang memperoleh perhatian akademik.

Penelitian terdahulu pada umumnya menyoroti peran Fretilin, UDT, dan intervensi Indonesia dalam memicu instabilitas politik pada pertengahan 1970-an. Beberapa studi lain mengangkat isu hak asasi manusia, operasi militer, dan dinamika internasional dalam konteks Perang Dingin. Namun, studi-studi tersebut lebih banyak menekankan dinamika eksternal, sementara transformasi sosial yang dialami masyarakat Timor Timur termasuk proses polarisasi internal, perubahan struktur kekuasaan lokal, serta pergeseran identitas politik—belum dibahas secara mendalam. Padahal, eskalasi konflik tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial yang muncul pasca-revolusi di Portugal serta persaingan ideologi antarpartai lokal yang membentuk lanskap politik baru di wilayah tersebut.

Artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menyoroiti dinamika sosial-politik sebagai faktor utama yang berkontribusi terhadap meningkatnya konflik di Timor Timur antara 1974 hingga 1999. Dengan menggunakan perspektif teori konflik sosial, konsep identitas politik, dan pendekatan perubahan struktur kekuasaan, penelitian ini menegaskan bahwa konflik Timor Timur merupakan hasil interaksi antara ketegangan sosial di tingkat komunitas, perebutan legitimasi antar aktor politik domestik, serta pengaruh eksternal yang memperumit situasi. Pendekatan historis yang digunakan memungkinkan analisis dilakukan secara kronologis, sehingga hubungan antara dinamika sosial-politik dan eskalasi konflik dapat terlihat secara lebih jelas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor sosial dan politik yang membentuk eskalasi konflik di Timor Timur sepanjang 1974–1999, menjelaskan bagaimana rivalitas internal dan kebijakan politik mempengaruhi meningkatnya ketegangan, serta menunjukkan hubungan antara dinamika domestik dengan intervensi eksternal yang terjadi selama periode tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akar konflik Timor Timur, sekaligus memperkaya kajian mengenai konflik etnopolitik, hubungan internasional, dan dinamika sosial-politik di kawasan Asia Tenggara.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan empat tahapan utama heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi serta memadukannya dengan pendekatan sejarah politik (*political history approach*) untuk menganalisis dinamika sosial-politik yang berkontribusi terhadap eskalasi konflik di Timor Timur pada periode 1974-1999. Pendekatan sejarah politik dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada relasi kekuasaan, perubahan struktur politik, manuver elite, serta intervensi negara dan aktor internasional dalam proses terbentuknya konflik.

Dalam penelitian ini, literatur sekunder menjadi komponen penting untuk memperkuat konteks historis dan analisis politik. Anderson (2003) dalam bukunya *Violence*

and Politics in Timor-Leste: 1974–1999 menelaah hubungan antara kekerasan dan dinamika politik, sehingga memberikan kerangka analisis mengenai konflik lokal. Cavallo (2005) dalam artikel *East Timor and the Decolonization of Portugal: Political Transitions and Social Dynamics* menyoroti proses dekolonisasi Portugal dan perubahan sosial-politik yang mempengaruhi Timor Timur, terutama menjelang runtuhnya rezim *Estado Novo*. Dunn (2003) melalui *Timor: A People Betrayed* menyajikan perspektif historis terkait pengkhianatan terhadap rakyat Timor, menekankan dampak kebijakan kolonial dan intervensi eksternal. Hatley (2001), dalam artikel *Militarization and Resistance in East Timor, 1974–1999* di *Asian Survey*, menganalisis militerisasi dan bentuk resistensi lokal yang muncul selama periode konflik. Ramos-Horta (1999) melalui memoar *Funu: The Unfinished Saga of East Timor* menyoroti pengalaman politik masyarakat Timor Timur, memberikan perspektif naratif yang kaya mengenai perjuangan rakyat. Suroso (2013) dalam skripsinya *Dekolonisasi dan Integrasi Timor Timur ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1976* meneliti proses dekolonisasi dan integrasi ke Indonesia, sedangkan Syahbuddin (2015) dalam artikel *Proses Dekolonisasi Republik Demokratik Timor-Leste dan Keterlibatan Indonesia* di *Jurnal Pendidikan IPS* membahas peran aktor domestik dan intervensi Indonesia secara lebih terperinci. Widodo (2025) melalui artikel *Perjalanan Timor Timur Menjadi Provinsi Indonesia (1975–1999)* di *King Jurnal Sejarah Indonesia* menelusuri dinamika politik dan kebijakan integrasi Indonesia dari tahun 1975 hingga 1999. Sementara itu, *Ensiklopedia Timor Timur / Sejarah Timor Timur* (tanpa tahun) digunakan sebagai rujukan faktual mengenai status kolonial dan perkembangan konflik pasca-1975. Dengan memadukan seluruh literatur ini, penelitian mampu membangun kerangka analisis yang komprehensif, menggabungkan perspektif historis, sosial-politik, dan naratif, sehingga mendukung pemahaman terhadap faktor-faktor yang memicu eskalasi konflik di Timor Timur.

Setelah sumber terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan kritik sumber untuk menilai kualitas dan keandalan data. Kritik ekstern dilakukan dengan memeriksa aspek fisik dan administratif dokumen, seperti asal instansi penerbit, identitas penulis, tahun

pembuatan, autentisitas arsip, serta bentuk reproduksinya. Kritik ini sangat penting terutama untuk dokumen-dokumen pemerintah dan arsip internasional yang sering mengalami penggandaan.

Kritik intern kemudian dilakukan dengan menelaah isi tiap sumber secara mendalam, mencakup analisis bias politik, tujuan pembuatan dokumen, posisi penulis dalam struktur kekuasaan, serta konteks peristiwa saat dokumen tersebut disusun. Mengingat konflik Timor Timur melibatkan banyak kepentingan, narasi dari pemerintah Indonesia, Portugal, Fretilin, UDT, maupun PBB kerap memiliki kontradiksi. Karena itu, dilakukan perbandingan silang antar berbagai jenis sumber untuk memperoleh data yang valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap interpretasi dilakukan dengan menghubungkan fakta-fakta historis yang telah diverifikasi untuk membangun pemahaman mengenai pola-pola yang lebih luas. Pada tahap ini, pendekatan sejarah politik digunakan untuk menafsirkan perubahan struktur kekuasaan, rivalitas elite lokal, dinamika kebijakan negara, serta pengaruh geopolitik global.

Interpretasi menunjukkan bahwa perubahan politik drastis di Portugal setelah Revolusi Anyelir menyebabkan ketidakpastian dalam proses dekolonisasi Timor Timur, yang kemudian melahirkan kekosongan otoritas. Kekosongan ini memperbesar rivalitas antara Fretilin dan UDT, yang dipengaruhi baik oleh perbedaan ideologi maupun kompetisi elite. Di tingkat regional dan internasional, dokumen pemerintah Indonesia serta laporan PBB memperlihatkan bahwa keputusan politik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konteks Perang Dingin, kekhawatiran terhadap pengaruh kiri, dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Melalui proses penafsiran ini, hubungan antara faktor domestik, regional, dan global dapat dipetakan secara lebih terstruktur.

Tahap terakhir adalah historiografi, yakni penyusunan narasi sejarah berdasarkan hasil interpretasi yang telah diperoleh. Narasi disusun secara kronologis namun tetap mempertahankan dimensi analitis agar dinamika konflik dari 1974 hingga 1999 dapat dipahami secara komprehensif. Dalam penulisan, berbagai perspektif—negara kolonial Portugal, pemerintah Indonesia, aktor politik lokal Timor Timur, media, serta lembaga

internasional ditempatkan secara proporsional untuk menghindari dominasi satu sudut pandang tertentu. Dengan menerapkan metode sejarah dan pendekatan sejarah politik, penelitian ini menghasilkan narasi yang tidak hanya menggambarkan rangkaian peristiwa, tetapi juga menjelaskan hubungan sebab-akibat antara perubahan struktur politik, tindakan aktor domestik, serta intervensi internasional dalam membentuk eskalasi konflik di Timor Timur.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Faktor-Faktor Sosial dan Politik yang Membentuk Eskalasi Konflik (1974-1999)

Akar konflik di Timor Timur pada periode 1974-1999 tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil akumulasi dari berbagai faktor sosial dan politik yang saling berkaitan. Perubahan politik di Portugal setelah Revolusi Anyelir 1974 menjadi titik awal yang mengguncang struktur kolonial Timor Timur (Anderson, 2003). Kebaruan ini tidak serta merta membawa arah yang jelas. Sebaliknya, perubahan tersebut menciptakan ruang kosong kekuasaan yang membuat masyarakat Timor Timur harus beradaptasi dengan sangat cepat terhadap situasi politik yang berubah drastis.

Pada masa sebelum 1974, Portugal menerapkan pemerintahan kolonial yang bersifat otoriter dan sangat terpusat. Kondisi ini membuat masyarakat Timor Timur minim pengalaman berpolitik, karena ruang untuk berpartisipasi hampir tidak ada. Ketika rezim Estado Novo runtuh, pemerintah baru Portugal menunjukkan keinginan untuk melakukan dekolonisasi, namun proses tersebut tidak diiringi dengan perencanaan yang matang. Berbagai dokumen transisi menunjukkan bahwa Portugal menghadapi dinamika internal yang lebih mendesak dibandingkan urusan koloninya, sehingga Timor Timur tidak mendapatkan perhatian yang memadai.

Dalam rentang waktu yang sangat singkat, masyarakat Timor Timur berhadapan dengan berbagai pilihan politik tanpa adanya kerangka transisi yang stabil. Ketidakjelasan kebijakan ditambah keluarnya sejumlah pejabat administrasi kolonial dari wilayah tersebut membuat masyarakat harus menentukan sikap politik dalam situasi yang penuh ketegangan

dan minim arahan. Ketidakpastian ini menciptakan kondisi yang rentan terhadap munculnya konflik.

Perubahan politik Portugal bersinggungan dengan realitas sosial Timor Timur yang sangat beragam. Di satu sisi, terdapat kelompok masyarakat perkotaan yang relatif lebih terhubung dengan dunia luar melalui pendidikan dan pekerjaan administratif. Kelompok ini lebih cepat menerima ide-ide politik baru seperti nasionalisme, sosialisme, dan gagasan kemerdekaan. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat pedesaan masih hidup dalam struktur tradisional berbasis suku, kekerabatan, dan hubungan patron-klien.

Ketimpangan akses informasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan membuat penerimaan terhadap gagasan politik baru berlangsung tidak merata. Masyarakat perkotaan yang lebih teredukasi lebih cepat menerima ide-ide seperti nasionalisme dan sosialisme, sementara masyarakat pedesaan masih bergantung pada struktur tradisional berbasis suku dan kekerabatan (Syahbuddin, 2015). Hal ini memunculkan polarisasi sosial-politik yang mempermudah terbentuknya garis-garis perpecahan antar kelompok (Suroso, 2013).

Ketimpangan inilah yang membuat kelompok elite local yang sebagian besar telah mendapat pendidikan formal memiliki posisi yang jauh lebih dominan dalam menentukan arah politik dibandingkan mayoritas masyarakat yang belum terbiasa dengan proses politik modern. Dengan demikian, kekacauan sosial yang muncul pada 1974-1975 bukan semata-mata dipicu oleh perebutan kekuasaan, melainkan juga oleh perbedaan tingkat kesiapan dan kapasitas sosial dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat.

Kemunculan partai politik seperti Fretilin, UDT, dan Apodeti mencerminkan perbedaan ideologis dan basis sosial-ekonomi yang ada di masyarakat (Anderson, 2003). Ketiga kelompok ini bukan hanya mewakili pandangan politik yang berbeda, tetapi juga mencerminkan berbagai orientasi sosial yang telah berkembang sebelumnya. Fretilin misalnya, lebih dekat dengan kaum muda terdidik dan sebagian penduduk perkotaan, sementara UDT memiliki hubungan kuat dengan kelompok elite tradisional dan keluarga berpengaruh yang pernah bekerja sama dengan administrasi kolonial. Apodeti, di sisi lain, banyak mendapatkan basis dukungan dari daerah perbatasan yang memiliki hubungan

sosial-ekonomi dengan wilayah Indonesia.

Perbedaan identitas ideologis inilah yang kemudian membentuk garis-garis politik baru di tengah masyarakat. Namun tanpa adanya mekanisme politik yang mapan, perbedaan tersebut tidak tertampung dalam ruang demokrasi yang sehat, melainkan berkembang menjadi potensi konflik. Situasi ini diperburuk oleh komunikasi politik yang tidak stabil baik antara kelompok-kelompok ini maupun antara aktor lokal dan pemerintah Portugal sehingga munculnya gesekan tidak lagi dapat dihindari.

Dinamika sosial pada masa tersebut ditandai oleh apa yang dalam kajian politik disebut sebagai *societal anxiety* atau kecemasan kolektif. Masyarakat merasakan ketidakpastian mengenai masa depan, baik secara ekonomi, politik, maupun keamanan. Kecemasan seperti ini sangat mudah dimanfaatkan oleh kelompok yang ingin memperkuat posisinya, dan dalam kasus Timor Timur, kondisi tersebut menjadi bahan bakar bagi persaingan politik antarpolisi yang berkembang begitu cepat.

Dalam situasi tersebut, isu-isu seperti status identitas, masa depan hubungan dengan Portugal, kemungkinan integrasi dengan Indonesia, serta risiko konflik antar kelompok lokal menjadi topik yang mengisi ruang-ruang diskusi masyarakat. Ketika kecemasan tersebut tidak terkelola dengan baik, ia berubah menjadi tindakan kolektif yang impulsif, yang kemudian memicu konflik terbuka.

Faktor sosial-politik yang membentuk eskalasi konflik di Timor Timur bukan sekadar akibat pertentangan ideologi atau perubahan politik eksternal. Konflik ini tumbuh dari interaksi antara struktur sosial yang rapuh, kebijakan kolonial yang tidak mempersiapkan masyarakat, dan ketegangan politik yang muncul dalam situasi transisi yang tidak stabil.

3.2 Rivalitas Internal, Pertarungan Elite, dan Kebijakan Politik yang Memperburuk Ketegangan

Rivalitas internal di Timor Timur pada 1974-1975 menjadi salah satu faktor kunci yang mempercepat terjadinya konflik terbuka. Rivalitas antarelite ini diperparah oleh ketidakpastian politik Portugal dan lemahnya mekanisme transisi, sehingga konflik internal berkembang menjadi kekerasan bersenjata setelah kudeta UDT 1975 (Ramos-Horta, 1999).

Penelitian menunjukkan bahwa ketegangan yang muncul bukan sekadar pertentangan antarpartai, tetapi juga cerminan dari kompetisi antarelite lokal, perbedaan orientasi historis, dan ketidaksiapan masyarakat menghadapi proses transisi yang berlangsung terlalu cepat. Ketika lembaga-lambaga politik belum mapan dan hubungan antar kelompok belum dibangun secara kokoh, perbedaan ini berubah menjadi proses polarisasi yang dalam dan kemudian mengarah pada kekerasan.

Elite politik Timor Timur pada masa transisi terbagi dalam beberapa kelompok yang masing-masing memiliki basis sosial dan sejarah hubungan yang berbeda dengan pemerintahan kolonial Portugal. UDT yang sebagian pendukungnya berasal dari keluarga-keluarga terpandang dan elite adat lebih banyak mendapatkan legitimasi melalui keterlibatan mereka dalam struktur pemerintahan kolonial sebelumnya. Fretilin, sebaliknya, diisi oleh kaum muda terdidik dan memiliki basis intelektual yang kuat, terutama dari generasi baru yang dipengaruhi oleh ide-ide antikolonial yang berkembang pada akhir 1960-an hingga awal 1970-an.

Perbedaan basis tersebut menciptakan ketegangan tersendiri. UDT memandang dirinya sebagai kelompok yang memiliki hak historis untuk memimpin proses transisi karena kedekatan mereka dengan administrasi kolonial, sedangkan Fretilin melihat perubahan politik sebagai kesempatan untuk membangun identitas politik baru yang bebas dari pengaruh elite tradisional. Ketegangan ini semakin kuat ketika keduanya tidak menemukan mekanisme dialog yang mampu menyatukan kepentingan mereka.

Kondisi tersebut diperparah oleh munculnya Apodeti yang mengusung agenda integrasi dengan Indonesia. Apodeti sering dianggap sebagai kelompok yang berada di luar persaingan utama Fretilin UDT, namun posisi politiknya menyebabkan dinamika internal semakin kompleks. Keberadaan Apodeti membuat konflik tidak hanya berbentuk perebutan dominasi politik, tetapi juga perebutan legitimasi mengenai masa depan negara.

Ketegangan antarpartai berkembang cepat karena dipicu oleh meluasnya rasa saling curiga. Dalam situasi transisi yang tidak stabil, narasi-narasi politik yang berkembang seringkali dipengaruhi oleh ketakutan, misinformasi, dan propaganda. UDT mencurigai Fretilin

sebagai kelompok radikal berhaluan kiri yang dapat membawa Timor Timur ke orbit politik yang tidak diinginkan oleh elite tradisional. Di sisi lain, Fretilin mencurigai UDT sebagai kelompok yang akan membawa Timor Timur kembali ke pengaruh kolonial atau tunduk pada kepentingan pihak luar.

Kecurigaan ini membuat proses komunikasi antar kelompok menjadi rapuh. Banyak keputusan politik tidak diambil berdasarkan dialog, melainkan berdasarkan penafsiran sepihak terhadap langkah politik lawan. Dalam konteks masyarakat yang belum terbiasa dengan perdebatan politik terbuka, polarisasi tersebut mudah menjalar ke tingkat akar rumput. Politisasi identitas kelompok, baik yang berbasis ideologi maupun kekerabatan, memperparah ketegangan tersebut.

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah bahwa kudeta yang dilakukan UDT terhadap Fretilin pada Agustus 1975 berfungsi sebagai pemicu utama terjadinya konflik bersenjata. Kudeta ini tidak hanya memicu ketegangan kuat di antara elite politik, tetapi juga membelah masyarakat ke dalam dua kubu besar. Fretilin yang mendapat dukungan dari sebagian milisi lokal merespons dengan mengorganisasi perlawanan dalam skala besar. Dalam hitungan hari, Timor Timur terpecah dalam konflik internal yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan perpindahan penduduk.

Konteks kudeta UDT sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari ketidakpastian politik Portugal dan terputusnya komunikasi antara otoritas kolonial dengan kelompok-kelompok lokal. UDT beranggapan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk mencegah Fretilin mengambil alih pemerintahan dengan dukungan militer atau kekuatan massa. Namun tindakan ini justru dianggap oleh Fretilin sebagai upaya delegitimasi, sehingga reaksi yang diambil bersifat militer.

Konflik bersenjata yang terjadi setelah kudeta memperlihatkan bahwa situasi di Timor Timur sudah berada di luar kendali. Pertarungan elite yang seharusnya dapat diselesaikan melalui negosiasi berubah menjadi konflik terbuka yang tidak hanya menghancurkan kohesi sosial, tetapi juga melemahkan posisi Timor Timur secara keseluruhan dalam menghadapi dinamika eksternal.

Kebijakan politik Indonesia setelah 1975 memperburuk ketegangan yang sudah ada. Pemerintah Indonesia melihat situasi konflik internal Timor Timur sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan dan sebagai peluang untuk memperluas pengaruh geopolitiknya. Namun pendekatan yang dilakukan Indonesia bukanlah pendekatan politik yang dialogis, melainkan menggunakan pola operasi militer dan mekanisme pemerintahan yang bersifat top-down.

Pendekatan militer yang diterapkan selama masa integrasi membuat ruang dialog politik semakin tertutup. Pada banyak kasus, tindakan keamanan yang keras memunculkan luka sosial yang dalam, terutama bagi masyarakat di pedesaan. Kontrol ketat terhadap aktivitas politik, pembatasan kebebasan sipil, dan praktik-praktik represif menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap otoritas. Perlawanan pun tidak mereda, tetapi justru berkembang dalam bentuk gerakan bawah tanah dan dukungan moral dari komunitas internasional. rivalitas internal dan kebijakan politik yang ditempuh Indonesia setelah integrasi bukan hanya memperpanjang konflik, tetapi juga membentuk pola kekerasan berulang yang menyebabkan Timor Timur sulit keluar dari ketegangan hingga menjelang 1999.

3.3 Hubungan antara Dinamika Domestik dan Intervensi Eksternal

Konflik di Timor Timur tidak dapat dipahami hanya dari dinamika internal yang berlangsung di dalam wilayah tersebut. Sejak awal, konflik ini berkembang dalam ruang yang dipengaruhi oleh kepentingan regional dan internasional, sehingga hubungan antara faktor domestik dan intervensi eksternal membentuk suatu jaringan penyebab yang saling memperkuat. Dinamika lokal yang rapuh, ditambah dengan kepentingan geopolitik kawasan serta logika Perang Dingin, menciptakan kondisi yang membuat konflik semakin sulit dikendalikan.

Pada pertengahan 1970-an, dunia sedang berada dalam situasi blok politik yang tegang antara Barat dan Timur. Setiap perubahan politik di negara-negara kecil sering dibaca melalui kacamata ideologis. Kemunculan Fretilin sebagai kelompok yang memiliki orientasi

kiri membuat beberapa negara Barat memandang masa depan Timor Timur dengan penuh kehati-hatian. Meskipun Fretilin menolak label komunis, identifikasi tersebut tetap berkembang karena kedekatan ideologisnya dengan gerakan-gerakan pembebasan nasional yang umum di negara-negara Dunia Ketiga pada masa itu.

Selain faktor internal, intervensi eksternal juga memainkan peran penting dalam eskalasi konflik. Indonesia melihat situasi internal Timor Timur sebagai ancaman potensial terhadap stabilitas kawasan dan menjalankan kebijakan integrasi yang bersifat militeristik, bukan dialogis (Dunn, 2003). Dukungan diplomatik dari negara-negara besar terhadap Indonesia memperkuat legitimasi tindakan tersebut di tingkat internasional, sementara kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia relatif minim pada awal periode konflik (Hatley, 2001).

Di tingkat regional, Indonesia yang berada di bawah rezim Orde Baru sangat sensitif terhadap kemungkinan hadirnya kekuatan berhaluan kiri di kawasan Asia Tenggara. Pemerintahan Soeharto yang anti-komunis memandang perkembangan politik di Timor Timur sebagai ancaman potensial terhadap stabilitas nasional. Kekhawatiran semacam ini bukan hanya didorong oleh ideologi, tetapi juga oleh strategi geopolitik Indonesia dalam mempertahankan posisi regionalnya. Situasi inilah yang membuat konflik lokal di Timor Timur dengan cepat mendapat perhatian negara-negara besar, bukan karena kepentingan langsung terhadap Timor Timur, tetapi karena ketakutan terhadap “efek domino” politik kawasan.

Intervensi eksternal tidak selalu berbentuk tindakan langsung, tetapi sering kali hadir dalam bentuk dukungan diplomatik, legitimasi politik, atau sikap diam yang disertai kepentingan tertentu. Beberapa negara besar khususnya yang memiliki hubungan strategis dengan Indonesia cenderung menafsirkan konflik di Timor Timur sesuai dengan kebijakan luar negeri mereka. Di awal periode konflik, dukungan terhadap pemerintah Indonesia cukup kuat di tingkat internasional, terutama karena Indonesia dianggap sebagai mitra strategis yang penting dalam menjaga stabilitas kawasan.

Dinamika lokal tetap berperan menentukan. Perlawanan yang terorganisasi dan kemampuan tokoh seperti José Ramos-Horta untuk membawa isu Timor Timur ke arena

internasional menunjukkan bahwa faktor domestik dapat memengaruhi perhatian global (Ramos-Horta, 1999). Puncak interaksi antara dinamika internal dan tekanan eksternal terlihat pada tahun 1999, ketika reformasi di Indonesia dan tekanan diplomatik internasional memungkinkan diadakannya referendum yang menunjukkan keinginan mayoritas masyarakat untuk merdeka (Anderson, 2003).

Sikap negara-negara besar ini memberikan ruang bagi Indonesia untuk menjalankan kebijakan integrasi dengan sedikit tekanan eksternal. Pada masa-masa awal konflik, kritik internasional terhadap tindakan Indonesia relatif minim, sementara dukungan militer atau politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, terus mengalir. Hal ini turut memengaruhi cara Indonesia membangun strategi politik dan keamanannya di Timor Timur yang pada akhirnya berdampak pada kondisi masyarakat lokal.

Pada awalnya dukungan terhadap Indonesia cukup kuat, dinamika domestik Timor Timur ikut memengaruhi perubahan pandangan masyarakat internasional. Faktor ini terlihat jelas sejak akhir 1980-an hingga 1990-an, ketika semakin banyak laporan mengenai kekerasan, pelanggaran HAM, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Indonesia. Publikasi dari lembaga internasional, jurnalis asing, serta kesaksian aktivis perlawanan yang berhasil keluar dari Timor Timur mulai membentuk citra baru mengenai konflik tersebut.

Perubahan perhatian internasional tidak hanya muncul karena laporan kekerasan, tetapi juga karena berkembangnya gerakan perlawanan yang lebih terorganisasi dan mampu membangun jaringan internasional. Tokoh-tokoh seperti José Ramos-Horta berhasil mengartikulasikan persoalan Timor Timur ke dalam bahasa diplomasi global, sehingga isu yang sebelumnya dianggap sebagai urusan domestik Indonesia berubah menjadi isu hak asasi manusia internasional. Perubahan ini menunjukkan bahwa dinamika lokal dapat memengaruhi arah kebijakan global ketika narasi yang dibangun mampu menjangkau arena internasional.

Intervensi eksternal seringkali tidak bersifat tunggal, melainkan bergerak dalam pola yang saling berkelindan dengan dinamika domestik. Rivalitas antarelite lokal dan ketegangan yang berkembang sejak 1974 membuat Timor Timur berada dalam posisi yang

sangat rentan terhadap intervensi luar. Dalam situasi politik yang rapuh, setiap langkah yang diambil oleh aktor domestic baik kudeta UDT, deklarasi kemerdekaan Fretilin, maupun perlawanan terhadap kebijakan Indonesia—dengan cepat mendapat respon dari negara-negara lain yang melihat perkembangan itu sebagai peluang atau ancaman.

Sikap aktor eksternal juga memengaruhi jalan konflik di tingkat lokal. Legitimasi internasional terhadap integrasi Indonesia, misalnya, membuat sebagian kelompok di Timor Timur kehilangan ruang untuk mengekspresikan aspirasi politiknya, sehingga perlawanan berkembang secara bawah tanah. Di sisi lain, meningkatnya sorotan internasional terhadap pelanggaran HAM pada akhir 1980-an memberikan energi baru bagi kelompok pro-kemerdekaan untuk memperkuat mobilisasi mereka.

Puncak keterhubungan antara dinamika domestik dan intervensi eksternal terlihat pada tahun 1999 ketika perubahan politik di Indonesia, tekanan internasional, serta sikap masyarakat Timor Timur bertemu dalam satu momentum yang menentukan. Reformasi politik di Indonesia setelah jatuhnya Orde Baru membuka ruang baru bagi penyelesaian konflik. Pada saat yang sama, tekanan diplomatik internasional terhadap pemerintah Indonesia mencapai titik yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Di Timor Timur, keinginan untuk menentukan masa depan secara bebas semakin menguat, dan situasi ini mendorong Indonesia dan PBB untuk menyepakati mekanisme referendum. Hasil referendum yang menunjukkan keinginan mayoritas masyarakat untuk merdeka memperlihatkan bahwa dinamika internal pada akhirnya berperan sebagai penentu, namun keberhasilan proses tersebut tidak dapat dilepaskan dari dukungan dan tekanan komunitas internasional.

Eskalasi konflik di Timor Timur merupakan hasil kombinasi antara faktor sosial-politik internal, rivalitas elite, ketidakstabilan transisi politik, serta intervensi eksternal dari negara-negara besar dan kebijakan Indonesia, yang saling memperkuat satu sama lain (Cavallo, 2005; Widodo, 2025).

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa eskalasi konflik di Timor Timur pada 1974-1999 merupakan hasil dari pertemuan antara dinamika sosial-politik internal dan intervensi eksternal. Perubahan politik di Portugal pasca-Revolusi Anyelir, ketidaksiapan administrasi kolonial dalam mengelola transisi, serta struktur sosial masyarakat Timor Timur yang belum merata dari segi pendidikan dan pengalaman politik menciptakan ruang ketidakpastian yang sangat besar. Dalam konteks tersebut, munculnya partai-partai politik dengan orientasi ideologis berbeda Fretilin, UDT, dan Apodeti tanpa mekanisme dialog dan transisi yang solid memicu polarisasi yang berkembang menjadi konflik terbuka sejak 1975. Rivalitas antar elite lokal, rasa saling curiga, serta perebutan legitimasi politik semakin memperkuat ketegangan internal yang kemudian menjadi pintu masuk bagi konflik yang lebih luas.

Di sisi lain, intervensi eksternal turut memperbesar kompleksitas konflik. Kebijakan Indonesia yang didorong oleh kekhawatiran geopolitik dan dinamika Perang Dingin mempercepat integrasi melalui pendekatan militer dan kontrol politik yang ketat, sehingga memperdalam perlawanan masyarakat Timor Timur. Dukungan atau toleransi negara-negara besar terhadap langkah Indonesia pada awalnya memberikan legitimasi internasional, tetapi berubah menjadi tekanan global ketika isu pelanggaran HAM mencuat pada akhir 1980-an. Pertemuan antara perubahan politik domestik Indonesia, mobilisasi perlawanan Timor Timur, dan meningkatnya perhatian internasional akhirnya membuka jalan menuju referendum 1999, yang menjadi titik balik utama penyelesaian konflik.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap konflik Timor Timur harus mempertimbangkan hubungan antara struktur sosial lokal, manuver politik domestik, dan kepentingan internasional. Temuan ini penting tidak hanya bagi kajian sejarah konflik, tetapi juga bagi studi resolusi konflik dan politik kawasan, khususnya mengenai pentingnya mekanisme transisi yang inklusif, dialog antarelite, serta sensitivitas kebijakan negara dalam mengelola wilayah dengan latar sosial dan pengalaman



historis yang berbeda. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pendekatan multidimensi dalam memahami konflik etnopolitik di kawasan Asia Tenggara maupun konteks global lainnya.

Daftar Pustaka

- Anderson, B. (2003). *Violence and politics in Timor-Leste: 1974–1999*. London: Routledge.
- Cavallo, D. (2005). East Timor and the decolonization of Portugal: Political transitions and social dynamics. *Journal of Southeast Asian Studies*, 36(2), 245–272.
- Dunn, J. (2003). *Timor: A people betrayed*. Sydney: University of New South Wales Press.
- Hatley, B. (2001). Militarization and resistance in East Timor, 1974-1999. *Asian Survey*, 41(4), 627–649.
- Ramos-Horta, J. (1999). *Funu: The unfinished saga of East Timor*. Boston: Atlantic Monthly Press.
- Suroso, J. (2013). Dekolonisasi dan integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1976 (Skripsi). Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Syahbuddin, S. (2015). Proses dekolonisasi Republik Demokratik Timor-Leste dan keterlibatan Indonesia. *Jurnal Pendidikan IPS*, 3(2), 34–48.
- Widodo, N. N. R. (2025). Perjalanan Timor Timur menjadi provinsi Indonesia (1975–1999). *King Jurnal Sejarah Indonesia*, 3(1), 12–31.
- "Timor Timur sebagai koloni Portugis dan konflik pasca-1975." (n.d.). Dalam *Ensiklopedia Timor Timur / Sejarah Timor Timur*. P2K STIKOM.